

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Parlindungan, A.P, 1991, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Cetakan Keenam, Bandung,
- Parlindungan, A.P, 1985, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung, Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2015, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chomzah, Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Pramukti, Angger Sugut, Widayanto, Erdha, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa Panduan Mengurus Peralihan Hak Atas Tanah Secara Aman*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2017. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Swadaya Grup, hlm 41.
- Burhan, Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang-Tangerang Selatan, hlm. 157.
- Harsono, Boedi, 2002, “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Sengketa-sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta, Hlm. 1.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, hlm. 24.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2018, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 18-19.
- Ruchiyat, Eddy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, hlm 48.
- Perangin, Effendi 1987, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta.

- H.M. Idris Mulyo, 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tiknjo, Imam Soe, 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sutiknjo, Imam, 1987, *Proses Terjadinya UUPA*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sihombing, Irene Eka, 2005, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cet. I, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soedjendro, J. Kartini, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media.
- Ramulyo, M. Idris, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Ctk Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- S.W.Sumardjono, Maria, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta.
- Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah*, TinggalCerdas Pustaka.
- Muwahid, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
- Sitorus, Oloan, 2014, *Hukum Tanah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1989, *Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum waris Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University press, Surabaya.

Khairandy, Ridwan, 2004, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, hlm 122.

Adiwinata, Saleh, 1984, *Bunga Rampai, Hukum Pereta dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Nugroho, Sigit Sapto, 2017, *Hukum Agraria*, Solo, Kafilah Publishing.

Soimin, Soed haryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, Soenaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta, UI Press.

Pugung, Solahudin, 2021, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggun Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Sri Sayekti, 2000, *Hukum Agraria Nasional*, Universitas Lampung, Lampung.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soimin, Sudaryo, 1994, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.

Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan*, R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung.

Sugianto, Thoyib, 2001, *Hukum Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta, Kencana.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan kedua, kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cetakan keenam, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Saleh, Wantjik, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, 1990, Hal. 161.

Projodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, Hlm 17

## B. Jurnal

Br Ginting, Mentari Maharani, “Kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) berdasarkan perkara perdata nomor 56/PDT/G/2009/PN.PBR”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2, Oktober 2016.

Darji Safutra, 2005, “*Pengalihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain (Studi Putusan Ma Nomor 234 Pk/Pdt/2004)*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Diana Zuhroh, “*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*”, *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, April 2017.

- Evaj Hutagalung, “Kedudukan Hukum Atas Surat Keterangan Ganti Rugi Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dikeluarkan Kantor Camat Mandau Duri Riau”, *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2017.
- Gian Alan Trio, “Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hakim Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.
- Hendra Dwi Putra, “*Kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Bukti Perolehan Hak Atas Tanah di Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau*”, Tesis, Program magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2016.
- Hutagalung, Evaj, “Kedudukan Hukum Atas Surat Keterangan Ganti Rugi Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dikeluarkan Kantor Camat Mandau Duri Riau”, *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan.
- Julius Sembiring, *Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, No 2, Juni, 2011.
- Khalidin, “Keberadaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Dalam Jual beli Tanah Di Kabupaten Rokan Hilir”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Musa Asy’ari, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni, 2020.
- Nur Hayati, “PERALIHAN HAK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)”, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember, 2016.
- Rukmana Manurung, Siti Hardianti, “Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota pekanbaru dalam meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM FOSIP*, Vol. 4. Nomor 2, Oktober, Tahun 2017.
- Santoso, Urip, “Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perpanjangan Jangka Waktu)”, *ADIL*, Vol. 2, No. 3, Desember, 2011.
- Sembiring, Julius, “Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, No 2, Juni, 2011.

Trio, Gian Alan, “Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hakim Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hukum Perkawinan.

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, Nomor 9 Tahun 1999.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Nomor 17 Tahun 2016,

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.